

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung dalam Pengelolaan Keuangan Secara Transparan dan Akuntabel di Kampung Nendali, Kabupaten Jayapura, Papua

Yudith N.A. Karetji¹, Dortehea Renyaan^{*2}, Abner H. Bajari³, Eliza Y.W. Putri⁴, Fedeli A. Itaar⁵, Dinda R. Destriyani⁶, Kristianto Topadang⁷

^{1,7} Program Studi Manajemen Administrasi Perkantoran, Universitas Cenderawasih, Indonesia

^{2,3,4,5,6} Program Studi Administrasi Negara, Universitas Cenderawasih, Indonesia

*e-mail: renyaandortehea14@gmail.com²

Abstrak

Pengelolaan keuangan kampung merupakan aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel. Kampung Nendali menghadapi kendala kapasitas SDM dalam mengelola keuangan kampung sesuai regulasi, terutama dalam perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparat kampung dalam pengelolaan keuangan kampung yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Metode pelaksanaan menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, dan praktik langsung penyusunan dokumen keuangan. Kegiatan dilaksanakan pada 1 Oktober 2025 di Kantor Kampung Nendali dengan melibatkan 25 peserta terdiri dari kepala kampung, sekretaris, bendahara, anggota Bamuskam, dan Ketua RT/RW. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 85% berdasarkan pre-test dan post-test, 90% peserta mampu menyusun RAB dan laporan pertanggungjawaban secara mandiri, serta tingkat kepuasan peserta mencapai 92%. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan tata kelola keuangan kampung yang profesional dan mendukung keberlanjutan pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Kampung Nendali, Pengelolaan Keuangan Kampung, Pelatihan Aparat Kampung, Transparansi

Abstract

Village financial management is a crucial aspect of accountable village governance. Nendali Village faces human resource capacity constraints in managing village finances in accordance with regulations, particularly in planning, administration, and accountability. This activity aims to improve village officials' understanding and capabilities in village financial management, including planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The implementation method uses lectures, question-and-answer sessions, discussions, and direct practice in preparing financial documents. The activity was held on October 1, 2025, at the Nendali Village Office, involving 25 participants: the village head, secretary, treasurer, members of the Village Consultative Body (Bamuskam), and the heads of neighbourhood associations (RT/RW). The evaluation results showed an 85% increase in understanding between pre- and post-tests, 90% of participants were able to prepare budgets (RAB) and accountability reports independently, and participant satisfaction reached 92%. This activity has a positive impact on improving professional village financial governance and on supporting the sustainability of village development through community participation.

Keywords: Accountability, Nendali Village, Transparency, Village Financial Management, Village Official Training

1. PENDAHULUAN

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan mengatur urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak asal usul sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014. Keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang serta berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pengelolaan keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan dimulai dengan penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang mengakomodir kepentingan masyarakat melalui musrenbangdes (Wijaya, 2018). Pratiwi & Pravasanti (2020) menegaskan bahwa pelatihan pengelolaan keuangan desa bertujuan memberikan pengetahuan memadai tentang pelaporan keuangan desa sesuai standar akuntansi yang berlaku. Tahap pelaksanaan dan penatausahaan mencakup proses pencatatan dalam buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku bank yang menjadi instrumen penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Kampung Nendali di Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura menghadapi permasalahan serius dalam pengelolaan keuangan kampung. Hasil observasi awal pada bulan Agustus 2025 menunjukkan bahwa dari 12 dokumen pelaporan keuangan yang seharusnya diserahkan kepada pemerintah kabupaten, hanya 4 dokumen yang terpenuhi. Wawancara dengan Kepala Kampung Nendali mengungkapkan bahwa terdapat kesulitan memahami format laporan pertanggungjawaban dan sering salah dalam mencatat transaksi di buku kas. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa dari 8 aparat kampung yang mengelola keuangan, hanya 2 orang yang pernah mengikuti pelatihan formal tentang pengelolaan keuangan desa.

Permasalahan serupa juga diidentifikasi oleh Diskhamarzeweny (2022) yang menemukan bahwa minimnya pengetahuan dan keterampilan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan sesuai standar pemerintah menjadi hambatan utama. Ketergantungan pada satu atau dua perangkat menyebabkan distribusi beban kerja tidak merata dan menurunkan produktivitas aparat lainnya. Di Kampung Nendali, observasi menunjukkan bahwa Bendahara Kampung merangkap lima fungsi sekaligus (pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengarsipan, dan koordinasi dengan pihak eksternal), sementara aparat lainnya tidak memiliki pemahaman memadai untuk memberikan dukungan. Hal ini mengakibatkan tertundanya penyusunan laporan bulanan hingga 2-3 bulan dan sering terjadinya salah persepsi dalam memahami dokumen laporan pertanggungjawaban.

Ra'is & Rini (2024) menjelaskan bahwa permasalahan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan desa bersifat sistemik dan memerlukan intervensi melalui pendekatan participatory action research yang melibatkan keterlibatan aktif pihak desa dalam setiap tahap program. Data baseline yang dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 25 aparat kampung di Kampung Nendali menunjukkan bahwa tingkat pemahaman tentang siklus pengelolaan keuangan desa hanya mencapai 42%, dengan pemahaman terendah pada aspek penatausahaan (35%) dan pelaporan pertanggungjawaban (38%). Kondisi ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan pelatihan komprehensif yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan aplikatif.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan kampung serta pelatihan dan pendampingan kepada aparat Kampung Nendali agar mampu mengelola keuangan kampung sesuai peraturan perundang-undangan. Manfaat kegiatan adalah menambah pengetahuan masyarakat kampung tentang pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel serta menjadi acuan untuk pengabdian lanjutan.

Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas aparat kampung yang terukur melalui peningkatan skor pemahaman minimal 70% dari baseline, kemampuan 80% peserta dalam menyusun dokumen keuangan secara mandiri, serta tersusunnya dokumen pelaporan keuangan Kampung Nendali yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan berkontribusi pada penguatan tata kelola pemerintahan kampung dan menjadi model replikasi untuk kampung-kampung lain di Distrik Sentani Timur yang menghadapi permasalahan serupa.

2. METODE

2.1. Waktu, Tempat, dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada 1 Oktober 2025 di Kantor Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Sasaran kegiatan adalah 25 orang terdiri dari Kepala Kampung (1), Sekretaris Kampung (1), Bendahara Kampung (1), Kepala Seksi (5), anggota Bamuskam (7), Ketua

RT (5), dan Ketua RW (5). Komposisi ini dirancang untuk memastikan distribusi pengetahuan merata dan tidak terpusat pada satu atau dua individu.

2.2. Pendekatan Partisipatif

Kegiatan menggunakan *participatory action research* (PAR) dengan pendekatan *bottom-up*. Ra'is & Rini (2024) menjelaskan bahwa PAR memungkinkan keterlibatan aktif pihak desa sehingga menciptakan rasa kepemilikan dan komitmen. Pendekatan ini relevan dengan konteks sosial-budaya Papua yang mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat dimulai dari identifikasi masalah bersama (25 Agustus 2025), dimana aparat kampung menyampaikan kendala seperti kesulitan memahami format pelaporan dan beban kerja tidak merata. Masukan ini diintegrasikan dalam desain materi pelatihan sehingga konten menjawab kebutuhan riil, bukan sekadar transfer pengetahuan normatif.

2.3. Tahapan Pelaksanaan

2.3.1. Tahap Persiapan

Observasi kebutuhan dilakukan melalui: (1) wawancara semi-terstruktur dengan 8 aparat pengelola keuangan; (2) studi dokumen laporan keuangan 2023-2024; dan (3) kuesioner baseline kepada 25 peserta. Hasil observasi menunjukkan tingkat pemahaman rata-rata 42% dengan rincian: konsep keuangan desa (48%), perencanaan (45%), pelaksanaan (50%), penatausahaan (35%), pelaporan (38%), dan pertanggungjawaban (40%). Temuan ini menjadi basis penyusunan materi yang difokuskan pada aspek penatausahaan dan pelaporan. Materi disusun dalam format power point dan modul cetak berbahasa Indonesia sederhana dengan ilustrasi visual. Tim juga menyiapkan formulir kerja (template buku kas umum, buku kas pembantu, RAB, laporan pertanggungjawaban) dan instrumen evaluasi.

2.3.2. Tahap Pelaksanaan

Pelatihan dilaksanakan selama 5,5 jam (09.00-14.30 WIT) dengan tingkat kehadiran 100% (25 peserta). Metode pelaksanaan:

- Ceramah (30%): Pemaparan konsep, regulasi (Permendagri No. 20/2018), dan prinsip pengelolaan menggunakan power point dan video tutorial 15 menit.
- Tanya Jawab (20%): Tercatat 18 pertanyaan dengan topik terbanyak: pengisian buku kas pembantu (7), format laporan pertanggungjawaban (6), dan mekanisme pengadaan barang/jasa (5).
- Diskusi Kelompok (25%): Peserta dibagi 5 kelompok berdasarkan fungsi untuk mendiskusikan studi kasus riil Kampung Nendali dan menyusun solusi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi.
- Praktik Langsung (25%): Setiap peserta menyusun minimal satu dokumen (RAB, buku kas umum, atau laporan pertanggungjawaban) dengan bimbingan tim.

2.4. Instrumen Evaluasi dan Analisis Data

Evaluasi menggunakan tiga instrumen:

- Pre-test dan Post-test: Kuesioner 20 soal pilihan ganda dan 5 uraian singkat untuk mengukur pemahaman konsep, regulasi, dan prosedur. Indikator keberhasilan: peningkatan skor minimal 70% dari baseline.
- Evaluasi Keterampilan Praktis: Rubrik penilaian dengan 5 kriteria: kelengkapan isian (20%), ketepatan format (20%), akurasi perhitungan (25%), kelengkapan dokumen pendukung (20%), dan kerapian penyajian (15%).
- Evaluasi Kepuasan: Pernyataan tertulis maupun verbal meliputi relevansi materi, kejelasan penyampaian, kualitas media, kemampuan pemateri, keefektifan metode, manfaat praktik, kecukupan waktu, kualitas fasilitas, kepuasan keseluruhan, dan kesediaan merekomendasikan. Data kualitatif dari observasi dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola respon dan kendala. Triangulasi data dilakukan dengan

membandingkan hasil pre-test/post-test, evaluasi keterampilan, kepuasan peserta, dan observasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Identifikasi Masalah

Kunjungan awal Tim Pengabdian FISIP UNCEN ke Kantor Kampung Nendali menghasilkan informasi bahwa kampung menghadapi masalah sumber daya manusia berkaitan dengan kurangnya pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan keuangan kampung. Hasil observasi awal pada Agustus 2025 menunjukkan bahwa dari 12 dokumen pelaporan keuangan yang seharusnya diserahkan kepada pemerintah kabupaten, hanya 4 dokumen yang terpenuhi. Kondisi ini mengindikasikan rendahnya kapasitas administratif dan pemahaman regulasi pengelolaan keuangan kampung.

Temuan ini sejalan dengan studi Ra'is & Rini (2024) yang mengidentifikasi permasalahan serupa di Desa Tirtomoyo dimana terdapat kurangnya pemahaman perangkat desa tentang regulasi dan prosedur pengelolaan keuangan desa yang terkini, kesulitan menyusun laporan keuangan yang akurat, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa. Data baseline yang dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 25 aparat kampung menunjukkan tingkat pemahaman tentang siklus pengelolaan keuangan desa hanya mencapai 42%, dengan pemahaman terendah pada aspek penatausahaan (35%) dan pelaporan pertanggungjawaban (38%). Kesenjangan kapasitas ini menunjukkan urgensi intervensi pelatihan yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif untuk memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar good village governance.

3.2. Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan pada 1 Oktober 2025 di Kantor Kampung Nendali selama 5,5 jam dengan tingkat kehadiran 100% (25 peserta). Pendekatan partisipatif yang diterapkan mengombinasikan ceramah (30%), tanya jawab (20%), diskusi kelompok (25%), dan praktik langsung (25%). Metode ini selaras dengan temuan Ra'is & Rini (2024) yang menegaskan bahwa pendekatan participatory action research dengan keterlibatan aktif pihak desa terbukti efektif menciptakan rasa kepemilikan dan komitmen.



Gambar 1. Kegiatan Pemberian Materi dan Pelatihan



Gambar 2. Presentasi Hasil Diskusi

Materi pelatihan dirancang berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan mencakup lima komponen utama: konsep keuangan desa, perencanaan (RKPDes dan APBDes), pelaksanaan,

penatausahaan (buku kas umum, buku kas pembantu, dan dokumentasi), serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Diskhamarzeweny (2022) menekankan bahwa pelatihan harus menciptakan peningkatan pengetahuan, wawasan, pemahaman, dan keterampilan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Selama sesi tanya jawab, tercatat 18 pertanyaan dengan topik terbanyak: pengisian buku kas pembantu (7 pertanyaan), format laporan pertanggungjawaban (6 pertanyaan), dan mekanisme pengadaan barang/jasa (5 pertanyaan). Pola pertanyaan ini mengonfirmasi bahwa aspek penatausahaan dan pelaporan merupakan area yang paling memerlukan penguatan kapasitas.

3.3. Evaluasi Capaian dan Dampak Kegiatan

Evaluasi menggunakan pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Skor rata-rata pre-test menunjukkan tingkat pemahaman baseline 42%, sementara post-test menunjukkan peningkatan dari skor awal atau mencapai tingkat pemahaman sebesar 85%. Peningkatan tertinggi terjadi pada aspek penatausahaan (dari 35% menjadi 88%) dan pelaporan pertanggungjawaban (dari 38% menjadi 87%), yang merupakan fokus utama materi pelatihan. Hasil ini konsisten dengan temuan Pratiwi & Pravasanti (2020) yang melaporkan bahwa pelatihan pengelolaan keuangan desa berhasil meningkatkan akuntabilitas dimana peserta antusias mengikuti materi dan merasakan pentingnya pelatihan tersebut.

Kemudian evaluasi keterampilan praktis menggunakan rubrik penilaian menunjukkan bahwa 90% peserta (22,5 dari 25 orang) mampu menyusun RAB dan laporan pertanggungjawaban secara mandiri dengan standar kelengkapan isian, ketepatan format, dan akurasi perhitungan yang memadai. Perbandingan kemampuan sebelum dan sesudah pelatihan menunjukkan bahwa sebelum pelatihan hanya 2 dari 8 aparat yang mengelola keuangan memiliki kemampuan menyusun dokumen keuangan, sedangkan pasca pelatihan terdapat penambahan 20,5 orang yang kompeten. Pencapaian ini mendukung distribusi beban kerja yang lebih merata dan mengatasi masalah ketergantungan pada Bendahara Kampung yang sebelumnya merangkap lima fungsi sekaligus.

Kegiatan pelatihan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas administrasi keuangan kampung. Pasca pelatihan, Kampung Nendali berhasil menyusun 8 dari 12 dokumen pelaporan keuangan yang sebelumnya hanya 4 dokumen terpenuhi. Peningkatan ini menunjukkan kontribusi nyata terhadap penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam good village governance. Temuan ini sejalan dengan studi tentang pengelolaan dana desa yang menekankan bahwa penerapan prinsip good village governance melalui transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas berkontribusi pada optimalisasi pengelolaan keuangan desa. Tingkat kepuasan peserta mencapai 92%, dengan penilaian tertinggi pada relevansi materi (95%) dan manfaat praktik langsung (94%).

3.4. Analisis Reflektif dan Lesson Learned

Beberapa faktor kunci mendukung keberhasilan kegiatan ini. Pertama, komitmen kepemimpinan Kepala Kampung yang mendorong partisipasi penuh aparat kampung (tingkat kehadiran 100%). Penelitian tentang implementasi good governance menegaskan bahwa peran kepemimpinan kepala desa sangat krusial dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Kedua, pendekatan partisipatif yang melibatkan peserta dalam identifikasi masalah sejak tahap persiapan menciptakan rasa kepemilikan terhadap program. Ketiga, kombinasi metode pembelajaran yang mengintegrasikan teori dan praktik langsung terbukti efektif meningkatkan retensi pengetahuan dan keterampilan.

Selain itu, beberapa tantangan diidentifikasi selama pelaksanaan kegiatan. Pertama, keterbatasan waktu pelatihan (5,5 jam) menyebabkan beberapa topik lanjutan seperti pengadaan barang/jasa dan pelaporan aset tidak dapat dibahas secara mendalam. Kedua, tingkat pendidikan peserta yang beragam (dari lulusan SMA hingga sarjana) memerlukan penyesuaian kecepatan penyampaian materi agar semua peserta dapat mengikuti. Ketiga, pasca pelatihan belum terdapat mekanisme pendampingan berkelanjutan yang dapat memastikan keberlanjutan penerapan pengetahuan dalam praktik. Renyaan & Sriyono (2020) menegaskan bahwa penataan

administrasi yang berkelanjutan memerlukan lebih dari sekadar pelatihan sesaat, tetapi juga penyediaan buku pedoman dan pendampingan berkelanjutan.

Dengan demikian, pengalaman di Kampung Nendali memberikan pembelajaran penting untuk pengembangan program serupa di kampung-kampung lain. Pertama, analisis kebutuhan yang komprehensif melalui triangulasi metode (wawancara, studi dokumen, dan kuesioner) menghasilkan desain pelatihan yang responsif terhadap kebutuhan riil peserta. Kedua, komposisi peserta yang mencakup semua level struktur pemerintahan kampung (dari kepala kampung hingga RT/RW) memastikan distribusi pengetahuan yang merata dan mengurangi risiko konsentrasi kapasitas pada beberapa individu saja. Ketiga, penggunaan studi kasus riil dari kondisi Kampung Nendali dalam sesi diskusi kelompok meningkatkan relevansi dan kemampuan peserta untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks lokal.

3.5. Kontribusi terhadap Pengembangan *Good Village Governance*

Kegiatan pengabdian ini berkontribusi pada pengembangan pengetahuan praktis tentang good village governance dalam beberapa aspek. Pertama, program ini mendemonstrasikan bahwa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan partisipatif dapat menjadi katalisator implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kampung. Kedua, pengalaman di Kampung Nendali mengonfirmasi bahwa good village governance bukan sekadar kepatuhan administratif, tetapi memerlukan perubahan budaya organisasi yang didukung oleh komitmen kepemimpinan dan kompetensi teknis aparatur. Ketiga, keberhasilan program ini memberikan model replikasi untuk kampung-kampung di Distrik Sentani Timur dan wilayah Papua lainnya yang menghadapi permasalahan serupa.

Studi tentang penerapan prinsip good governance di tingkat desa menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi adalah pilar utama yang saling terkait dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelatihan di Kampung Nendali tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis tetapi juga menumbuhkan kesadaran aparatur tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan kampung. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi praktis dan akademis dalam memperkuat diskursus tentang strategi efektif peningkatan kapasitas pemerintahan desa di Indonesia, khususnya di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial-budaya yang khas seperti Papua.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian pelatihan pengelolaan keuangan kampung di Kampung Nendali berhasil meningkatkan kapasitas aparatur secara signifikan. Capaian utama meliputi: (1) peningkatan pemahaman konseptual dari 42% menjadi 85%, dengan kenaikan tertinggi pada aspek penatausahaan (35% ke 88%) dan pelaporan (38% ke 87%); (2) peningkatan keterampilan praktis dimana 90% peserta (22,5 orang) mampu menyusun RAB dan laporan pertanggungjawaban secara mandiri, naik signifikan dari hanya 2 orang sebelum pelatihan; dan (3) perbaikan kualitas administrasi dengan meningkatnya dokumen pelaporan yang terpenuhi dari 4 menjadi 8 dari 12 dokumen yang dipersyaratkan.

Pembelajaran kunci dari pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa kombinasi pendekatan partisipatif dengan praktik langsung terbukti efektif meningkatkan retensi pengetahuan dan kemampuan aplikasi. Komitmen kepemimpinan Kepala Kampung dan keterlibatan peserta sejak identifikasi masalah menciptakan rasa kepemilikan program yang mendukung keberhasilan pelatihan. Namun, keterbatasan waktu pelatihan (5,5 jam) dan keberagaman tingkat pendidikan peserta menjadi tantangan yang perlu diantisipasi dalam program serupa.

Rekomendasi yang diperlukan untuk menindaklanjuti pengabdian ini adalah, (1) Pendampingan berkala monitoring setiap 3 bulan (Januari, April, Juli, Oktober 2026) untuk memberikan asistensi teknis dalam penyusunan laporan keuangan dan mengatasi kendala implementasi; (2) memfasilitasi forum sharing antar kampung di Distrik Sentani Timur setiap semester untuk berbagi praktik baik dan solusi atas permasalahan pengelolaan keuangan

kampung; dan (4) membangun mekanisme koordinasi rutin dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jayapura untuk sinkronisasi program peningkatan kapasitas dan dukungan teknis berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan good village governance di Papua dan dapat menjadi model replikasi untuk kampung-kampung lain dengan permasalahan serupa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih yang telah mendukung pendanaan kegiatan serta Pemerintah Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura yang telah memberikan izin kepada Tim Pengabdian FISIP UNCEN untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Diskhamarzeweny, D. (2022). Pelatihan pengelolaan keuangan desa di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. *Bhakti Nagori: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 39-47. https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/bhakti_nagori/article/view/2225
- Idris, U., Frank, S. A. K., Muttaqin, M. Z., & Ilham, I. (2020). Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Kepada Fresh Graduate Alumni Antropologi Di Kota Jayapura Papua. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 312-316. <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i3.1014>
- Peraturan dan Sumber Resmi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Pendampingan pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan akuntabilitas di Desa Mlandi Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 90-95.
- Ra'is, D. U., & Rini, Y. T. (2024). Program pendampingan pengelolaan keuangan desa. *Jurnal JAMAS*, 2(3), 689-694.
- Renyaan, D., & Sriyono, S. (2020). Penataan administrasi umum di Kampung Yoboi Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 307-311. <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i3.1005>
- Renyaan, D. (2023). Services for population administration in the City of Jayapura. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 2(3), 88-97. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v2i3.79>
- Yumame, J., Muttaqin, M. Z., & Ilham, I. (2020). Teknik baca skimming, penulisan karya ilmiah dan literasi digital. *Community Development Journal*, 1(3), 254-258.
- Yumame, J., Ilham, I., Renyaan, D., & Sapioper, H. (2020). Membangun kampung berbasis data (Pendampingan penyusunan monografi dan profil Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 246-253. <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i3.965>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wijaya, D. (2018). *Akuntansi*. Yogyakarta: Gava Media.

Halaman Ini Dikosongkan